

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun penelitian mencakup tahun 2008-2015 dimaksudkan agar mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan pada penelitian ini di Bab III dari 5 Kabupaten/Kota semuanya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun pemilihan sampel telah disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pemda yang memiliki Laporan Reallisasi Pendapatan dari tahun 2008-2015	5
2.	Pemda yang tidak memiliki Laporan Realisasi Pendapatan dari tahun 2008-2015	0
	Total sampel	40
	Jumlah keseluruhan data dengan menggunakan perhitungan rasio pertumbuhan PAD = 8 tahun dikalikan dengan 5 Instansi diperoleh hasil 40 data.	

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 4.1 telah diperoleh total sampel yaitu 5 instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota D. I. Yogyakarta yang telah memenuhi kriteria sampel yang diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan masing masing Kabupaten/Kota di D. I. Yogyakarta yaitu BKAD Kabupaten Bantul, BKAD Kabupaten Gunungkidul, BKAD Kabupaten Kulonprogo, BKAD Kabupaten Sleman, dan BKAD Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan periode penelitian selama 8 tahun yaitu dari tahun 2008-2015, sehingga diperoleh data sebanyak 40 data yang akan digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian dari perhitungan statistik untuk membuktikan hipotesis yang ada pada penelitian. Pada penelitian ini, analisis statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

1. Analisis Deskriptif

a. Laporan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan masing masing

Kabupaten/Kota D. I. Yogyakarta.

1) Kabupaten Bantul

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul
Tahun 2008-2015

Kabupaten Bantul						
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Retribusi Daerah	PAD
2008	-8,63	23,3	8,78	10,09	20,65	21,97
2009	29,06	26,54	18,7	199,44	56,59	27,06
2010	89,68	108,51	63,21	54,91	-72,55	-7,94
2011	43,14	268,58	48,25	7,79	11,39	57,88
2012	527,41	87,54	98,24	30,78	15,71	29,24
2013	40,15	31,9	7,78	19,76	31,66	34,58
2014	1,21	18,5	21,66	-22,8	-4,99	59,36
2015	8,7	19,53	-7,99	-5,54	-11,84	9,37

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul

Berdasarkan Tabel 4.2 tentang laporan realisasi pertumbuhan pendapatan di Kabupatenn Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak hotel dari tahun 2008 sampai dengan 2015 pengenaan pajak hotel terendah terdapat pada tahun 2008 dengan nilai presentase sebesar -8,62%. Pengenaan terendah pada tahun 2008 disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi krisis global yang berdampak terhadap pendapatan pengusaha hotel, sedangkan pengenaan pajak hotel tertinggi terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 527,41% hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk beristirahat maupun menggunakan jasa yang ditawarkan oleh hotel.

Selain itu, untuk pajak restoran dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak restoran terendah terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar 18,5%, hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan pajak restoran yang menyebabkan pengusaha pada bisnis ini tidak melakukan kewajibannya dengan semestinya sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran. Sedangkan pengenaan pajak restoran tertinggi terdapat pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar 268,58%. Pengenaan tertinggi pada tahun ini dikarenakan pereconomian pada tahun tersebut sedang dalam kondisi yang baik.

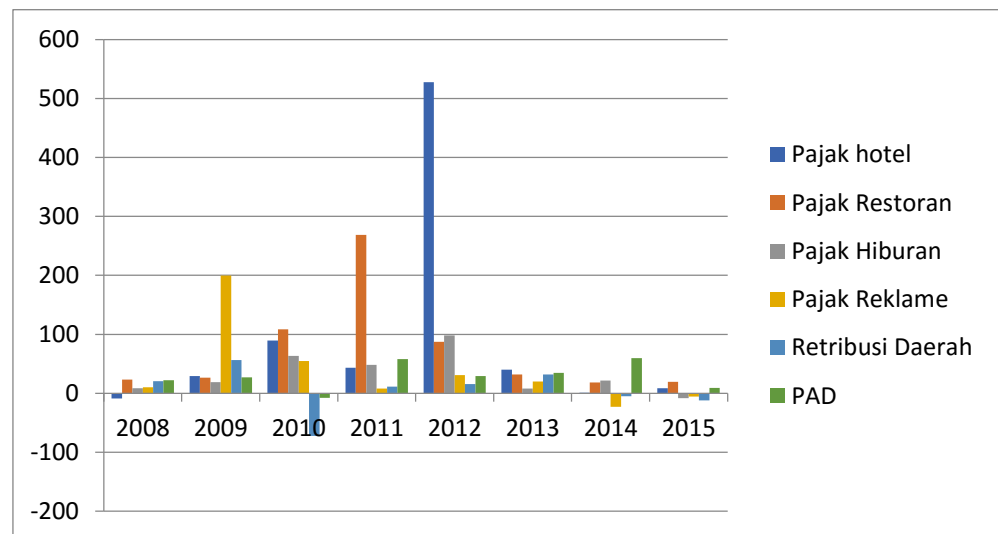
Adapun untuk pajak hiburan dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak hiburan terendah terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar -7,99%, hal ini dikarenakan minimnya para pelaku pajak hiburan yang membayar pajak sesuai kewajibannya sehingga

berdampak pada penerimaan pajak hiburan. Sedangkan pengenaan pajak hiburan tertinggi berada pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 98,24%, hal ini dikarenakan efektivitas pemungutan pajak hiburan yang cukup baik.

Adapun pajak reklame dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak reklame terendah terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar -22,8% hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan pada pemungutan pajak reklame sehingga banyak pajak reklame yang tidak dapat dipungut dengan baik dan menyebabkan penerimaan pajak reklame yang rendah. Sedangkan pengenaan pajak reklame tertinggi terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 199,44% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun politik yang menyebabkan banyak jasa reklame yang digunakan.

Tidak hanya itu, retribusi daerah dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2010 dengan nilai presentase sebesar -72,55% hal ini dikarenakan kurang efektifnya pemungutan retribusi daerah tersebut, sehingga berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Sedangkan pengenaan retribusi daerah tertinggi terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 56,59%, hal ini dikarenakan baiknya pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada penerimaan retribusi daerah.

Adapun untuk pendapatan asli daerah dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun -7,94%. Pengenaan terendah PAD ini disebabkan karena pada tahun tersebut merupakan dampak dari bencana alam yang menyebabkan menurunnya daya pariwisata di daerah ini sebagai salah satu sumber PAD. Sedangkan pengenaan PAD tertinggi terdapat pada tahun 2014%, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun pertumbuhan ekonomi yang baik untuk mendorong sektor pariwisata menjadi salah satu sumber PAD. Adapun pertumbuhan PAD Kabupaten Bantul tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :



Gambar 4.1
Laporan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Bantul Tahun 2008-2015

2) Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunung
Kidul Tahun 2008-2015

Kabupaten Gunung Kidul						
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Retribusi Daerah	PAD
2008	-69	0,7	-14,3	32,69	16,09	14,02
2009	-0,45	-2,72	12,41	38,97	23,8	16,53
2010	20,74	31,92	-7,81	12,66	15,62	20,72
2011	57,49	42,72	11,89	16,65	54,62	17,47
2012	85,16	857,55	14,68	13,15	72,81	-44,12
2013	9,6	63,88	25,75	0,36	27,24	174,47
2014	31,46	50,17	16,67	-1,73	2,63	90,95
2015	318,71	41,06	96,54	2,61	9,25	23,1

Sumber : BKAD Kabupaten Gunung Kidul

Berdasarkan Tabel 4.3 tentang laporan realisasi pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Gunung Kidul dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pajak hotel dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2008 dengan nilai presentase sebesar -69% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi krisis global yang mempengaruhi sektor pariwisata yang berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa hotel. Sedangkan pengenaan tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase 318,71%, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang dalam kondisi baik.

Adapun untuk pajak restoran dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar -2,72% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut masih memperoleh dampak dari adanya krisis global yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Sedangkan pengenaan tertinggi pajak restoran terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 857,55% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut perekonomian sudah mulai membaik, begitu juga dengan ditandainya pembangunan aksesibilitas ke objek pariwisata yang mampu menarik pengusaha restoran dan meningkatkan penerimaan pajak restoran.

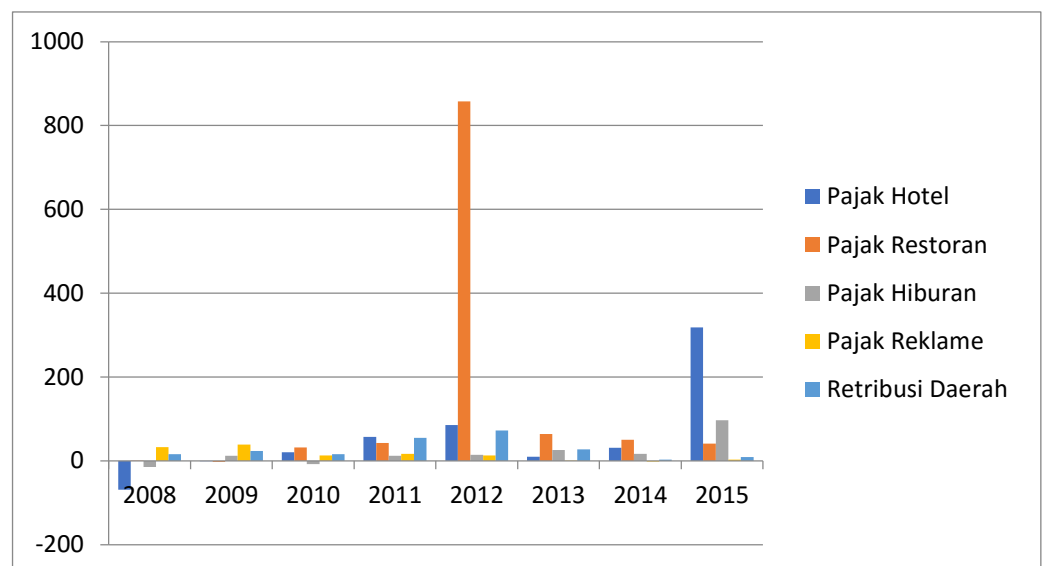
Selain itu, untuk pajak hiburan dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2008 dengan nilai presentase sebesar 14,3%, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut sedang terjadi krisis global yang berdampak pada penerimaan pajak hiburan. Sedangkan pengenaan pajak hiburan tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar 96,54% hal ini dikarenakan pada tahun

tersebut mulai meningkatnya pembangunan tempat-tempat hiburan oleh pelaku industri hiburan yang meningkatkan obyek pajak hiburan yang berdampak dalam penerimaan pajak hiburan.

Tidak hanya itu, untuk pajak reklame dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak reklame terendah terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar -1,73%, hal ini dikarenakan kurang efektifnya jasa pemasangan reklame pada daerah tersebut, sehingga menyebabkan pengusaha lebih memilih memasarkan barang atau jasanya menggunakan media yang lain. Sedangkan pengenaan pajak reklame tertinggi terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 38,97% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun politik sehingga berdampak terhadap pemasangan reklame yang nantinya mampu meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Tidak hanya itu, retribusi daerah dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar 2,63% hal ini dikarenakan kurang efektifnya pemungutan retribusi daerah tersebut, sehingga berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Sedangkan pengenaan retribusi daerah tertinggi terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 72,81%, hal ini dikarenakan baiknya pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada penerimaan retribusi daerah.

Adapun untuk PAD dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar -44,12% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut kurang maksimalnya penerimaan sektor non pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Sedangkan pengenaan PAD tertinggi terdapat pada tahun 2013 dengan nilai presentase sebesar 174,47%, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah daerah mampu memaksimalkan penerimaan non pajak yang berdampak pada penerimaan PAD. Adapun pertumbuhan PAD Kabupaten Gunung Kidul tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2
Laporan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2008-2015

3) Kabupaten Kulon Progo

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2008-2015

Kabupaten Kulon Progo						
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Retribusi Daerah	PAD
2008	61,38	12,03	26,77	10,92	19,45	9,45
2009	-1,48	-47,15	19,35	-14,1	-77,84	-6,93
2010	36,07	110,21	-13,92	36,33	30,56	22,67
2011	197,67	6,19	-79,14	5,72	9,36	11,33
2012	279,48	259,91	23,89	-1,96	37,92	37,72
2013	3,88	58,51	72,39	1,36	28,58	29,67
2014	-9,7	26,94	2,23	1,4	-54,78	65,45
2015	0,72	18,74	518,42	-24,77	2,78	7,56

Sumber : BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Tabel 4.4 tentang laporan realisasi pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pajak hotel dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar -9,7%, hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya pemungutan pajak hotel di wilayah ini. Sedangkan pengenaan pajak hotel tertinggi terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 279,48% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut kondisi perekonomian sudah membaik, hal ini didukung dengan pembangunan aksesibilitas ke tempat-tempat tujuan wisata yang berdampak pada penerimaan pajak hotel.

Adapun pajak restoran dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak restoran terendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar -47,15% hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi global pada tahun tersebut sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran. Sedangkan pengenaan pajak restoran yang tertinggi terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 259,91% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut kondisi perekonomian sedang dalam keadaan yang baik, khususnya didalam negeri.

Selain itu, untuk pajak hiburan dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar -79,14% hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan pajak hiburan yang mengakibatkan banyak pengusaha industri hiburan yang

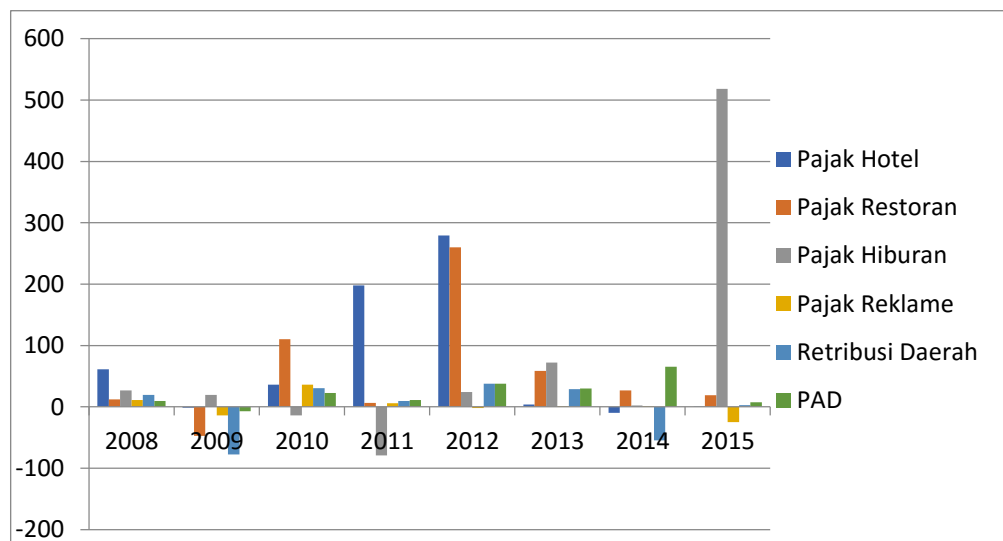
tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Sedangkan pengenaan pajak hiburan tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar 518,42% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut banyak pertunjukan maupun hiburan yang diadakan oleh pengusaha industri hiburan dengan pemungutan pajak hiburan yang baik akan berdampak baik terhadap penerimaan pajak hiburan.

Adapun untuk pajak reklame dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak terendah terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar -24,77% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut banyak pelaku wajib pajak reklame yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga berdampak pada penerimaan pajak reklame. Sedangkan pengenaan pajak reklame dari tahun 2008-2009 terdapat pada tahun 2010 dengan nilai presentase sebesar 36,33% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak reklame terbilang efektif dan pengawasan dalam pemungutannya dapat dikatakan cukup baik.

Tidak hanya itu, untuk retribusi daerah dari tahun 2008-2015 pengenaan retribusi daerah terendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar -77,84% hal ini disebabkan pada tahun tersebut kurang efektifnya pemungutan retribusi daerah tersebut, sehingga berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Sedangkan pengenaan retribusi daerah tertinggi terdapat pada tahun 2012 dengan nilai

presentase sebesar 37,92%, hal ini dikarenakan baiknya pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada penerimaan retribusi daerah.

Adapun PAD dari tahun 2008-2015 pengenaan PAD terendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar -6,93% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut kurang maksimalnya penerimaan daerah yang disebabkan oleh pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang tidak optimal. Sedangkan pengenaan PAD tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar 65,45% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan sedang dalam kondisi yang baik, baik dari sektor pajak maupun non pajak. Adapun pertumbuhan PAD Kabupaten Kulon Progo tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut :



Gambar 4.3

**Laporan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2008-2015**

4) Kabupaten Sleman

**Tabel 4.5
Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sleman
Tahun 2008-2015**

Kabupaten Sleman						
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Retribusi Daerah	PAD
2008	27,13	25,47	74,59	71,52	27,1	16,56
2009	25,25	14,28	2,36	10,6	5,1	11,8
2010	23,55	33,64	4,1	0,62	8,02	3,7
2011	0,73	30,04	-28,43	2,82	-43,9	39,05
2012	42,31	26,41	40,40	21,64	2,63	32,79
2013	28,82	25,57	29,07	7,16	41,04	49,22
2014	19,99	32,95	14,57	-6,46	-11,19	27,62
2015	5,03	39,86	53,7	-18,67	5,68	12,17

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Tabel 4.5 tentang laporan realisasi pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Sleman dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel diatas memberikan informasi mengenai pajak hotel dari tahun 2008-2015 pengenaan pajak hotel terendah terdapat pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar 0,73% hal ini disebabkan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh hotel tidaklah banyak, sehingga mengakibatkan penerimaan hotel yang rendah dan berdampak terhadap pengenaan pajak hotel. Sedangkan pajak hotel tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 42,31% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut kondisi perekonomian sedang dalam keadaan yang baik, sehingga mendorong para wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata dan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh hotel, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak hotel.

Adapun untuk pajak restoran dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 14,28% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut pelaku usaha industri restoran kurang optimal dalam pengelolaannya sehingga berdampak pada penerimaan pajak restoran. Sedangkan pengenaan pajak restoran tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar 39,86% hal ini dikarenakan para pelaku industri restoran sudah mampu mengelola usahanya dengan optimal sehingga

mampu menghasilkan penerimaan yang cukup baik dan berdampak terhadap pajak restoran.

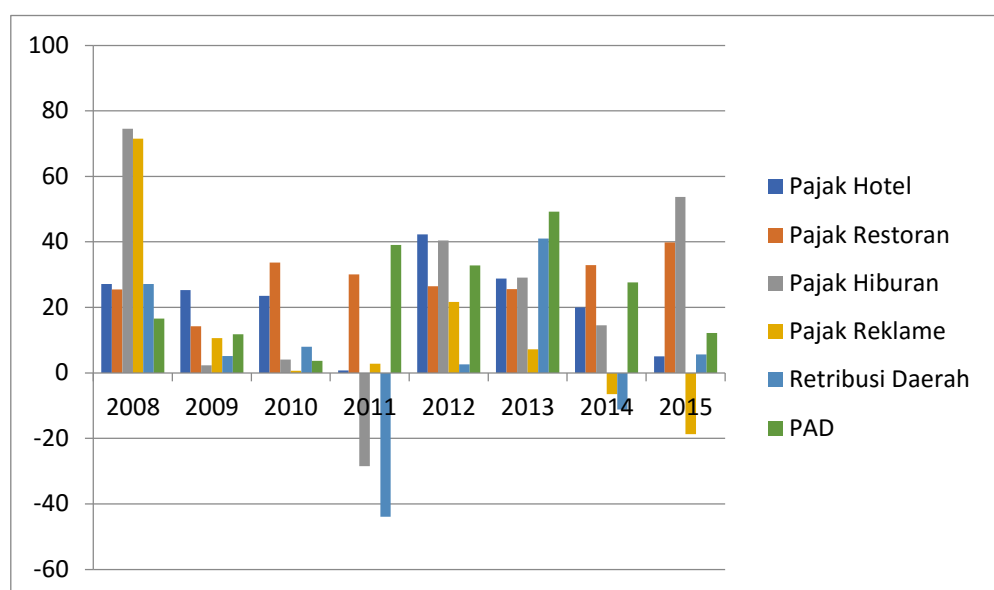
Selain itu, untuk pajak hiburan dari tahun 2008-2015% pengenaan terendah terdapat pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar -28,43% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut merupakan dampak dari penurunan efektifitas industri hiburan dikabupaten tersebut. Sedangkan pengenaan tertinggi pajak hiburan dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2008 dengan nilai presentase sebesar 74,59% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut industri hiburan sedang dalam kondisi yang baik.

Adapun untuk pajak reklame dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar -18,67% hal ini dikarenakan banyak wajib pajak reklame yang tidak membayar pajaknya dengan baik dan pengawasan pemungutan pajak reklame yang kurang efektif sehingga berdampak pada penerimaan pajak reklame. Sedangkan pajak reklame tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2008 dengan nilai presentase sebesar 71,52% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun persiapan untuk tahun politik, sehingga banyak yang menggunakan reklame sebagai media untuk promosi.

Tidak hanya itu, retribusi daerah dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar -43,9% hal ini dikarenakan kurang efektifnya pemungutan

retribusi daerah tersebut, sehingga berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Sedangkan pengenaan retribusi daerah tertinggi terdapat pada tahun 2013 dengan nilai presentase sebesar -41,04%, hal ini dikarenakan baiknya pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada penerimaan retribusi daerah.

Sementara untuk PAD dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah PAD terdapat pada tahun 2010 dengan nilai presentase sebesar 3,7% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan dampak dari bencana alam yang mengakibatkan potensi pendapatan dari sektor pajak maupun non pajak menjadi berkurang. Sedangkan PAD tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2013 dengan nilai presentase sebesar 49,22% hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang secara umum sedang baik. Adapun pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :



Gambar 4.4
Laporan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Sleman Tahun 2008-2015

5) Kota Yogyakarta

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta
Tahun 2008-2015

Kota Yogyakarta						
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Retribusi Daerah	PAD
2008	29,29	10,13	17,03	37,09	19,67	16,07
2009	15,99	13,07	82,97	1,37	-32,75	21,93
2010	5,61	10,92	24,63	-7,78	37,1	11,12
2011	16,44	3,79	0,87	17,26	6,81	27,56
2012	46,89	17,01	-1,03	15,29	12,68	47,81

2013	22,56	15,32	58,47	11,65	4,04	13,23
2014	18,42	30,93	13,65	-25,61	39,06	22,87
2015	15,47	17,71	-11,4	0,09	-28,59	8,48

Sumber : BKAD Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 4.6 tentang laporan realisasi pertumbuhan pendapatan di Kota Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel diatas menunjukkan bahwa pajak hotel dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2010 dengan nilai presentase sebesar 5,61% hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut merupakan tahun terjadinya bencana alam, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan hotel yang berdampak pada pengenaan pajak hotel. Sedangkan pajak hotel tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 46,89% hal ini dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun perekonomian yang baik.

Adapun pajak restoran tahun 2008-2015 pengenaan pajak restoran terendah terdapat pada tahun 2011 dengan nilai presentase sebesar 3,79% hal ini disebabkan karena tahun tersebut masih terkena dampak dari bencana alam ditahun sebelumnya, sehingga pengenaan pajak restoran pada tahun ini terbilang rendah. Sedangkan pajak restoran tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar 30,93% hal ini dikarenakan pada tahun

ini kondisi perekonomian sudah mulai stabil, dan berdampak terhadap pengenaan pajak restoran.

Selain itu, untuk pajak hiburan dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar - 11,4% hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan dan pengawasan pajak hiburan, sehingga berdampak pada penerimaan pajak hiburan yang rendah. Sedangkan pengenaan tertinggi pajak hiburan dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 82,97% hal ini dikarenakan pada tahun tersebut jumlah pengusaha industri hiburan mulai meningkat dan efektifnya pengawasan pemerintah dalam pemungutan pajak hiburan.

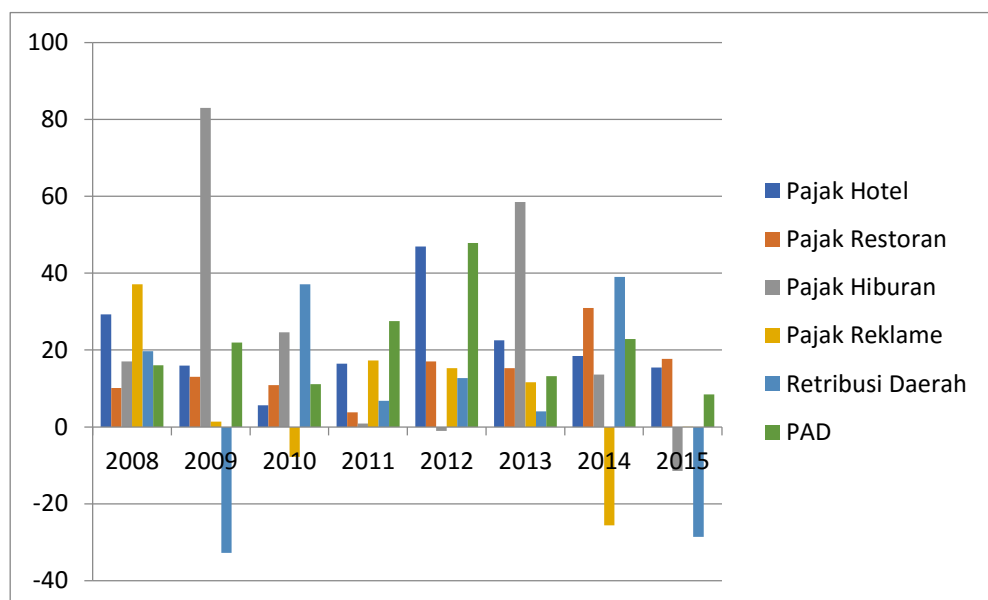
Adapun untuk pajak reklame pengenaan terendah dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar - 25,61% hal ini disebabkan oleh banyaknya pajak reklame yang tidak dapat dipungut dengan baik, sehingga berdampak pada penerimaan pajak reklame. Sedangkan pengenaan tertinggi pajak reklame dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2008 dengan nilai presentase sebesar 37,09% hal ini dikarenakan pada tahun ini merupakan persiapan tahun politik, sehingga banyak para pelaku politik yang menggunakan reklame sebagai media untuk promosi.

Tidak hanya itu, untuk pengenaan retribusi terendah dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar - 32,75% hal ini dikarenakan pada tahun ini kurang maksimalnya

pengawasan dan pemungutan retribusi daerah sehingga berdampak terhadap penerimaan retribusi daerah. Sedangkan pengenaan retribusi tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar 39,06% hal ini dikarenakan pada tahun ini kondisi perekonomian dalam kondisi yang cukup stabil.

Adapun untuk PAD dari tahun 2008-2015 pengenaan terendah terdapat pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar 8,48% hal ini dikarenakan upaya pemerintah yang kurang optimal dalam mengumpulkan penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berdampak pada rendahnya PAD. Sedangkan pengenaan PAD tertinggi dari tahun 2008-2015 terdapat pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 47,81% hal ini dikarenakan pada tahun ini pengelolaan dan pengawasan penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan dilakukan dengan baik.

Adapun pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut :

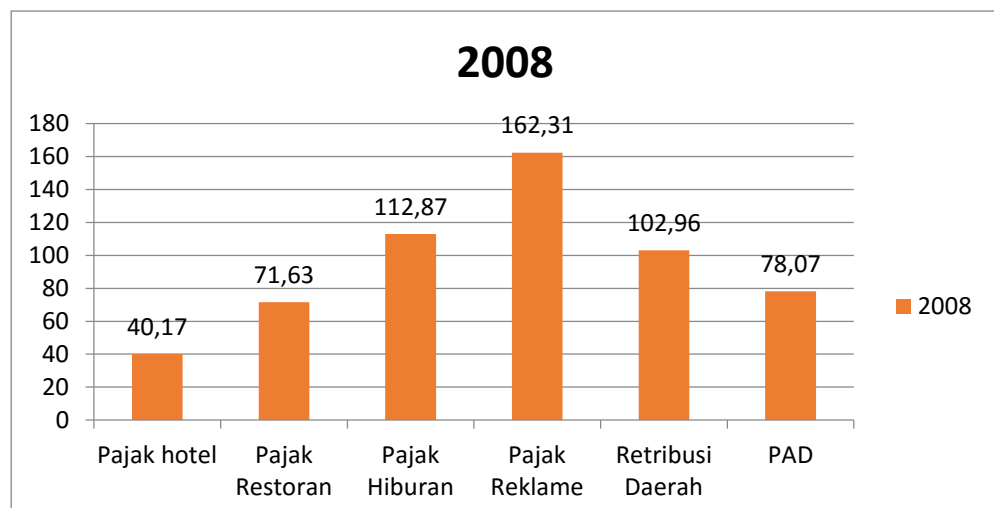


Gambar 4.5
Laporan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kota Yogyakarta
Tahun 2008-2015

b. Laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta per Tahun

1) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta tahun

2008 disajikan pada gambar 6 sebagai berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.6
Laporan Realisasi Total Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta
Tahun 2008

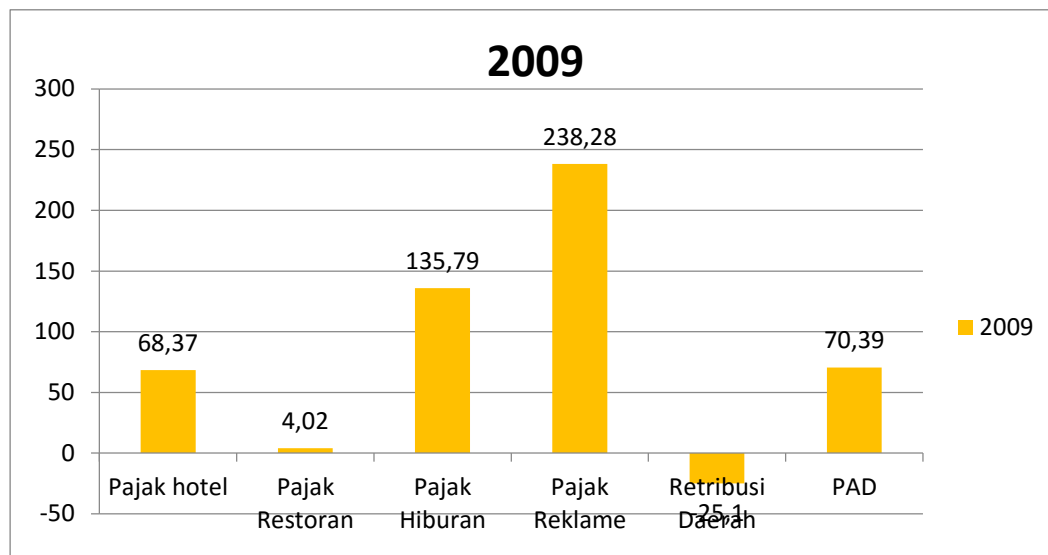
Berdasarkan gambar 4.6 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2008 pajak hotel memiliki presentase sebesar 40,17%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 71,63%. Pajak hiburan memiliki presentase sebesar 112,87%. Pajak reklame memiliki presentase sebesar 162,31%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 102,96%. Dan pendapatan asli daerah dengan nilai presentase sebesar 78,07%.

Adapun hal-hal yang menyebabkan presentase pajak reklame meningkat pada tahun ini yaitu :

- a) Provinsi D. I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam industri bisnis yang memerlukan reklame sebagai salah satu media promosi bagi para pelaku bisnis.
- b) Pada tahun 2008 merupakan tahun persiapan untuk tahun politik, sehingga banyak pelaku politik yang menggunakan media reklame.

2) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta tahun 2009

disajikan pada gambar 7 sebagai berikut :



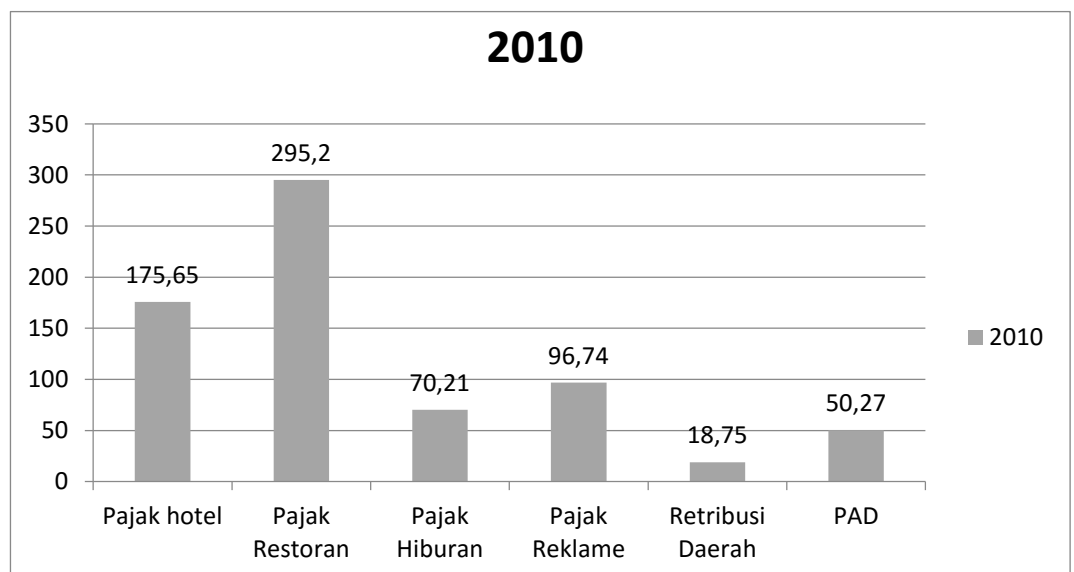
Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.7
Laporan Realisasi Total Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2009

Berdasarkan gambar 4.7 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pajak hotel memiliki presentase sebesar 68,37%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 4,02%. Pajak hiburan memiliki presentase sebesar 135,79%. Pajak reklame memiliki presentase sebesar 238,28%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 25,1%. Dan pendapatan asli daerah dengan nilai presentase sebesar 70,39%. Adapun hal-hal yang menyebabkan presentase pajak reklame meningkat pada tahun ini yaitu :

- a) Pada tahun tersebut merupakan tahun politik dimana para pelaku politik menggunakan reklame sebagai media untuk promosi.
- b) Mulai berkembangnya berbagai bisnis para pelaku industri yang menggunakan reklame sebagai media untuk menawarkan barang dan jasa mereka.

- 3) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 disajikan pada gambar 4.8 sebagai berikut :



Sumber : DPPKAD D. I. Yogyakarta

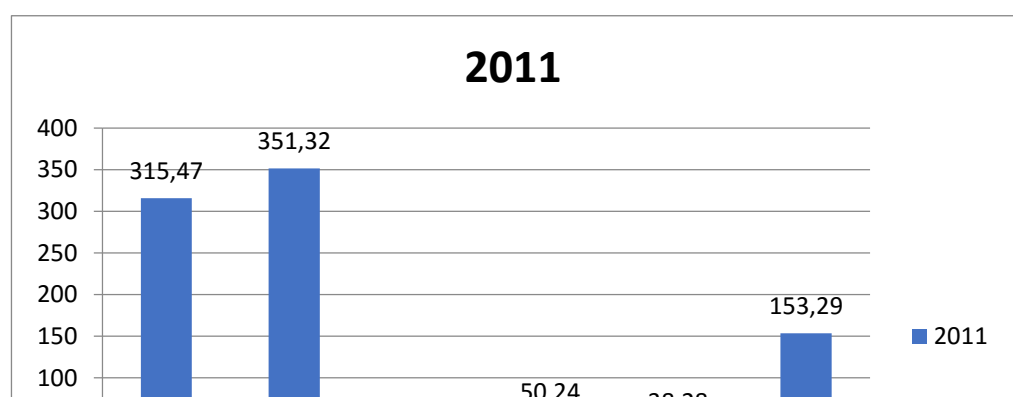
Gambar 4.8
Laporan Realisasi Total Pendapatan D. I. Yogyakarta
Tahun 2010

Berdasarkan gambar 4.8 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai presentase sebesar 175,65%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 295,2%. Pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 70,21%. Pajak reklame memiliki nilai presentase sebesar 96,74%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 18,75%. Dan pendapatan asli daerah dengan nilai presentase sebesar 50,27%.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pajak restoran mengalami peningkatan yaitu :

- a) D. I. Yogyakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisata bagi para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke D. I. Yogyakarta.

- 4) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011 disajikan pada gambar 4.9 sebagai berikut :



Sumber : DPPKAD D. I. Yogyakarta

Sumber : DPPKAD D. I. Yogyakarta

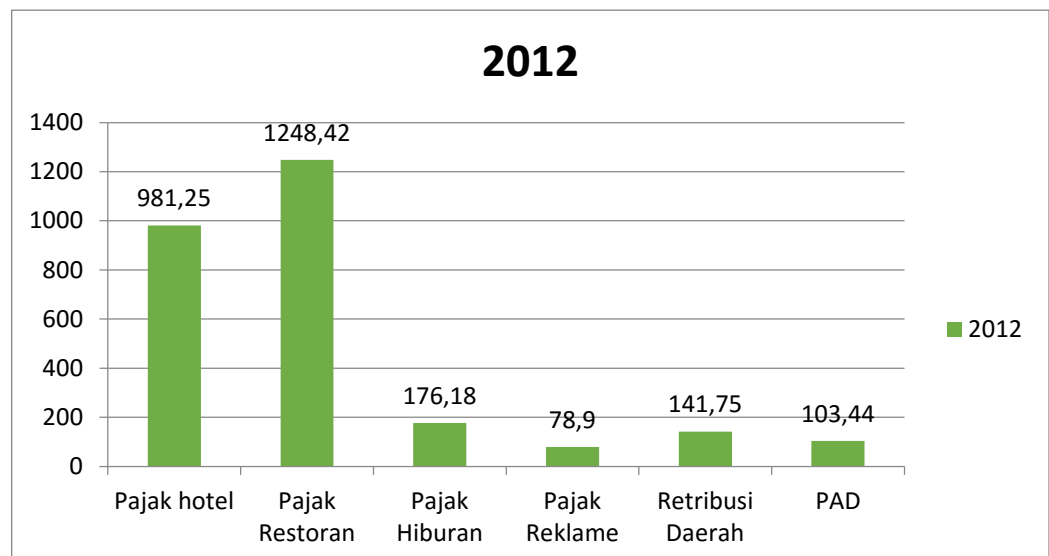
Gambar 4.9
Laporan Realisasi Total Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta
Tahun 2011

Berdasarkan gambar 4.9 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai presentase sebesar 315,47%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 351,32%. Pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 46,56%. Pajak reklame memiliki nilai presene sebesar 50,24%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 38,28%. Dan pendapatan asli daerah memiliki nilai presentase sebesar 153,29%. Adapun hal-hal yang menyebabkan pajak restoran mengalami peningkatan yaitu :

- a) D. I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing.
- b) Pada tahun tersebut terjadi adanya peningkatan pengunjung yang menggunakan jasa restoran.

- c) Adanya peningkatan pertumbuhan pajak restoran dari tahun sebelumnya.

- 5) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta tahun 2012 disajikan pada gambar 4.10 sebagai berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4 .10
Laporan Realisasi/ Total Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun 2012

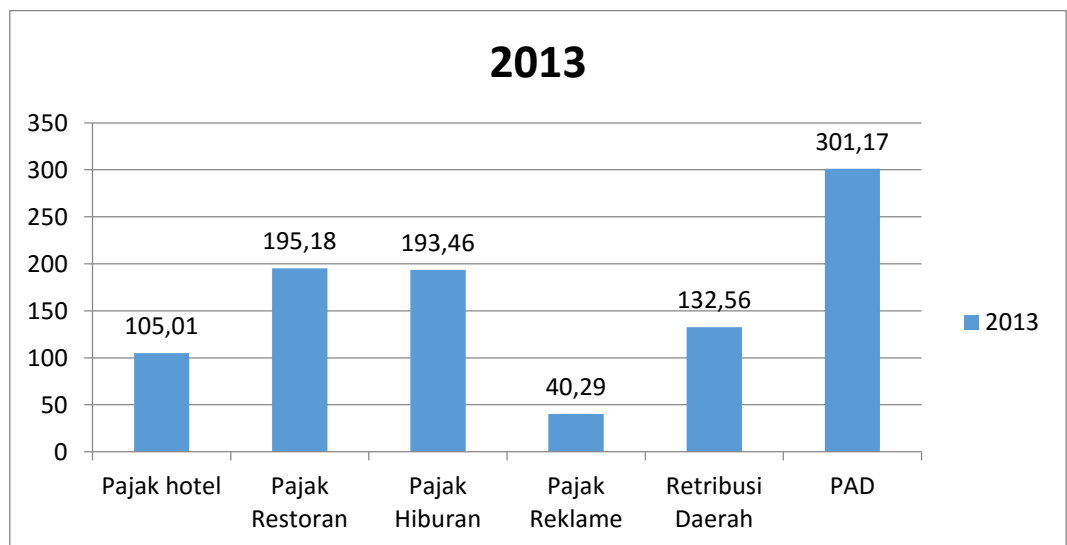
Berdasarkan gambar 4.10 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai presentase sebesar 981,25%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 1248,42%. Pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 176,18%. Pajak reklame memiliki nilai presentase sebesar 78,9%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 141,75%. Dan pendapatan asli daerah memiliki nilai presentase sebesar 103,44%.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pajak restoran mengalami peningkatan yaitu :

- a) D.I. Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata bagi wisatawan asing maupun lokal.
- b) D.I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menyuguhkan berbagai macam kuliner yang mampu menarik para pengunjung.
- c) Banyaknya peluang usaha dibidang kuliner membuat para pelaku industri kuliner mendirikan restoran.
- d) Adanya peningkatan pertumbuhan pajak restoran dari tahun sebelumnya.

6) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta tahun 2013

disajikan pada gambar 4.11 sebagai berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

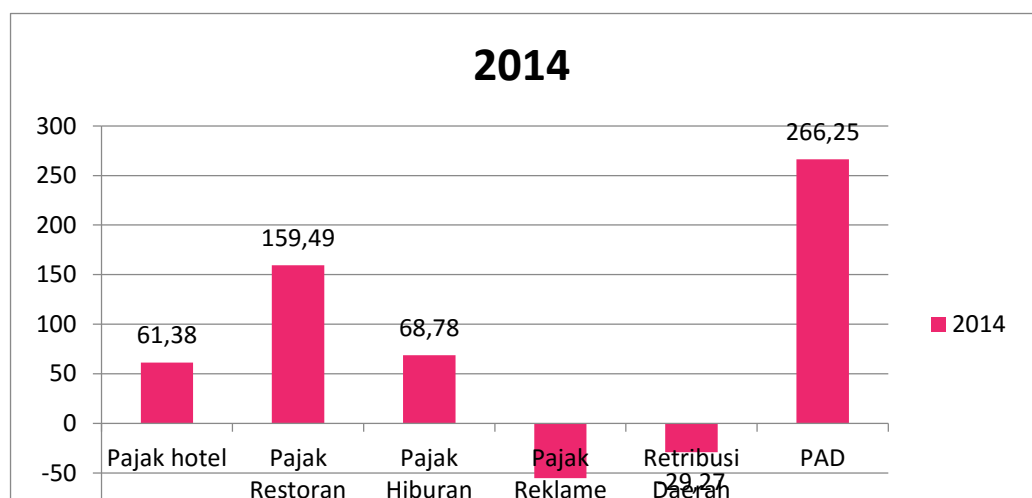
Gambar 4.11
Laporan Realisasi Total Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2013

Berdasarkan gambar 4.11 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai presentase sebesar 105,01%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 195,18%. Pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 193,46%. Pajak reklame memiliki nilai presentase sebesar 40,29%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 132,56%. Dan pendapatan asli daerah memiliki nilai presentase sebesar 301,17%.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yaitu :

- a) Meningkatnya penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan
- b) Pada tahun tersebut kondisi perekonomian sedang dalam keadaan yang stabil.
- c) Efektifnya sistem pemungutan dan pengawasan penerimaan daerah dari pemerintah.

7) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta tahun 2014 disajikan pada gambar 4.12 sebagai berikut :



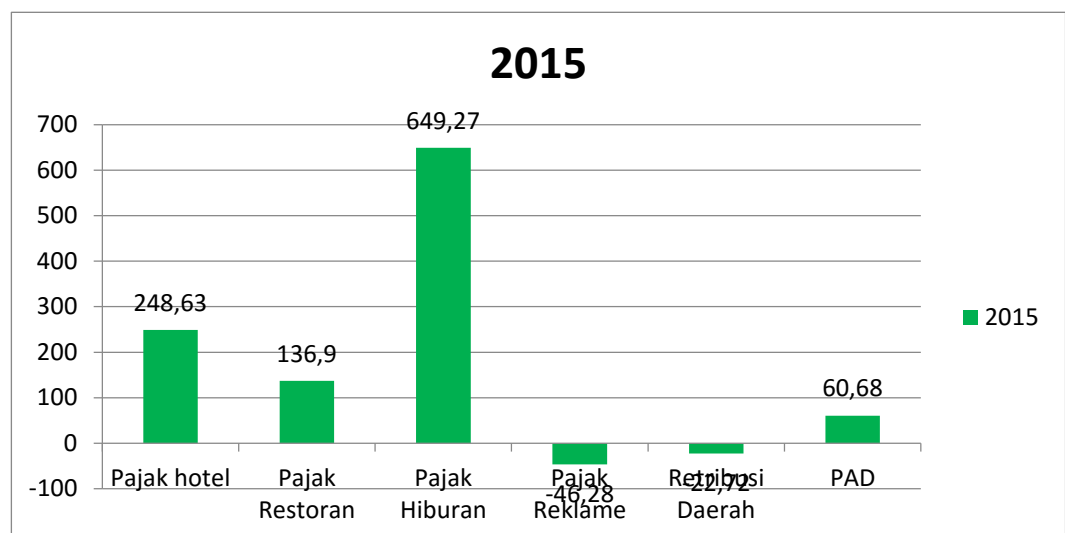
Sumber : DPKKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.12
Laporan Realisasi Total Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2014

Berdasarkan gambar 4.12 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai presentase sebesar 61,38%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 159,49%. Pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 68,78%. Pajak reklame memiliki nilai presentase sebesar -55,2%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar -29,27%. Dan pendapatan asli daerah memiliki nilai presentase sebesar 266,25%. Adapun hal-hal yang mengakibatkan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yaitu :

- a) Meningkatnya penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan
- b) Pada tahun tersebut kondisi perekonomian sedang dalam keadaan yang stabil.
- c) Efektifnya sistem pemungutan dan pengawasan penerimaan daerah dari pemerintah.

- 8) Hasil laporan Realisasi Pendapatan Provinsi D. I. Yogyakarta tahun 2015 disajikan pada gambar 4.13 sebagai berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.13
Laporan Realisasi Total Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2015

Berdasarkan gambar 4.13 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai presentase sebesar 248,63%. Pajak restoran memiliki nilai presentase sebesar 136,9%.

Pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 649,27%. Pajak reklame memiliki nilai presentase sebesar -46,28%. Retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar -22,72%. Dan pendapatan asli daerah memiliki nilai presentase sebesar 60,68%.

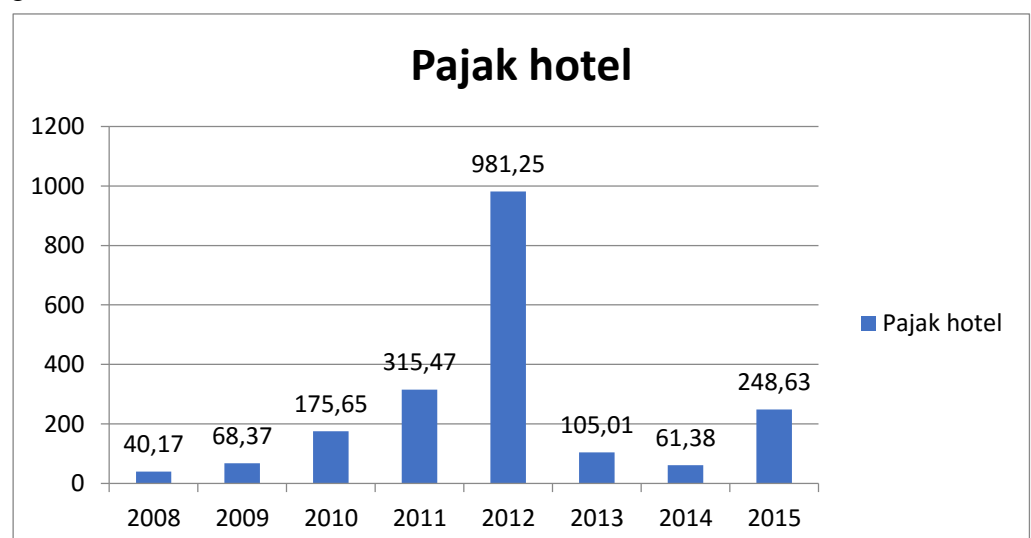
Adapun hal-hal yang menyebabkan pajak hiburan mengalami peningkatan yaitu:

- a) Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisata baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing.
- b) Banyaknya pelaku industri hiburan yang mendirikan tempat-tempat hiburan.
- c) Pada tahun tersebut mulai berkembang tempat-tempat hiburan sehingga mampu meningkatkan pajakh hiburan.

c. Laporan Realisasi Pertumbuhan Masing-Masing Variabel pada Provinsi D.I. Yogyakarta

1) Pajak Hotel

Hasil laporan realisasi pertumbuhan pajak hotel dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut :



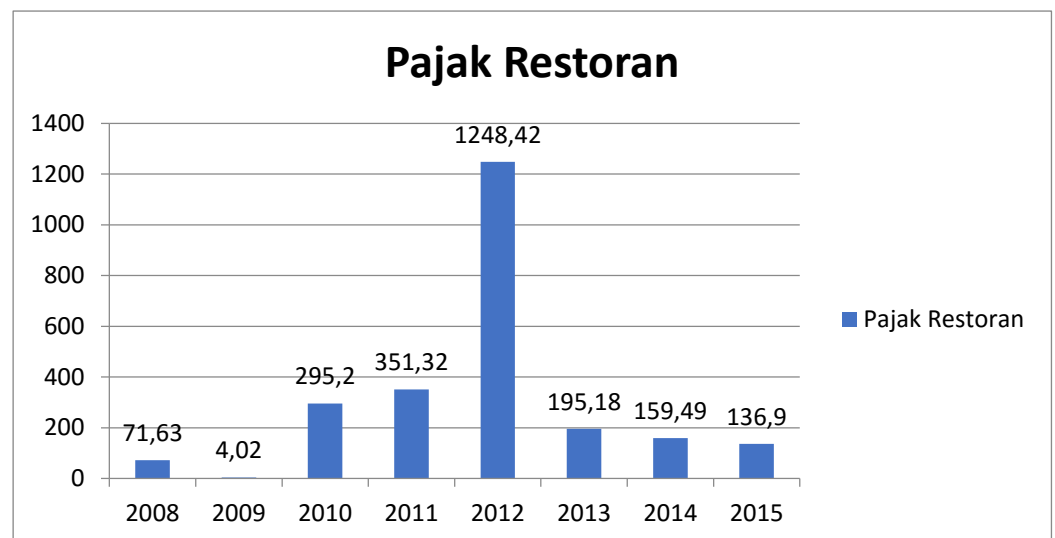
Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.14
Laporan Realisasi Total Pertumbuhan Pajak Hotel
D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2015

Berdasarkan gambar 4.14 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel pada provinsi D.I. Yogyakarta tidak konsisten. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2008 nilai presentase sebesar 40,17% kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 68,37% dan terjadi lagi peningkatan pada tahun 2010 dengan nilai presentase sebesar 175,65%. Kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar 315,47% dan tidak hanya itu, pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai presentase sebesar 981,25%. Namun, pada tahun 2013 justru mengalami penurunan yang signifikan sebesar 105,01%, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun berikutnya tahun 2014 dengan nilai presentase sebesar 61,38%. Namun, pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 248,63%. Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD yang terbesar dari pajak hotel yaitu terjadi pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 981,25%.

2) Pajak Restoran

Hasil laporan realisasi pertumbuhan pajak restoran dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

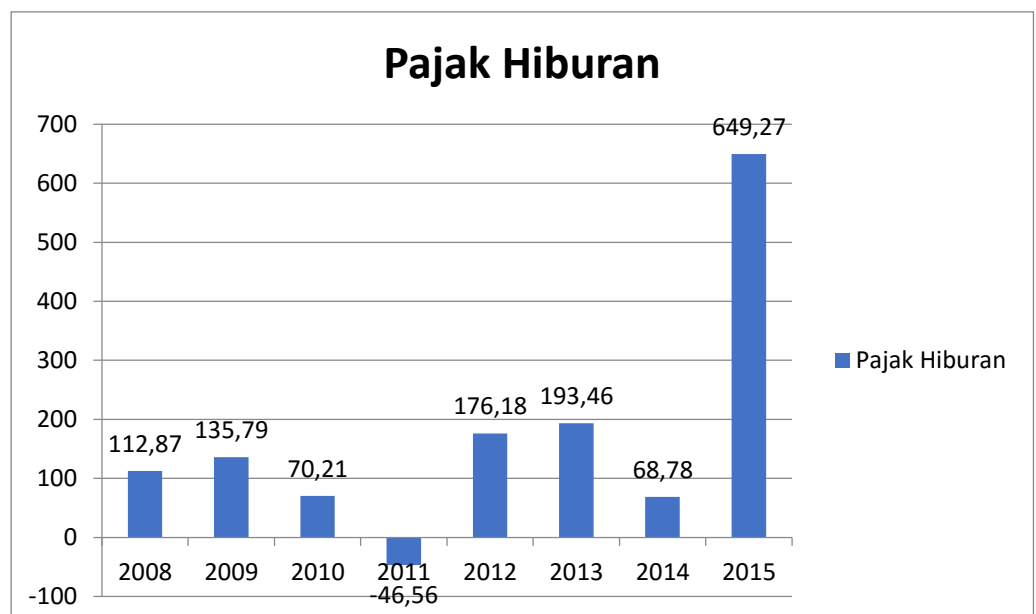
Gambar 4.15
Laporan Realialisasi Total Pertumbuhan Pajak Restoran
D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2015

Berdasarkan gambar 4.15 selama periode penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak restoran di D.I. Yogyakarta tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 nilai presentase pajak restoran sebesar 71,63%, kemudian tahun 2009

mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 4,02% dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 295,2%. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan dengan nilai presentase sebesar 351,32%, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai presentase sebesar 1248,42%. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup drastis dengan nilai presentase sebesar 195,18%, diikuti pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 159,49%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali dengan nilai presentase sebesar 136,9%. Sehingga dapat disimpulkan dari gambar diatas bahwa realisasi penerimaan PAD yang terbesar dari pajak restoran yaitu terjadi pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 1248,42%.

3) Pajak Hiburan

Hasil laporan realisasi pertumbuhan pajak hiburan dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut :



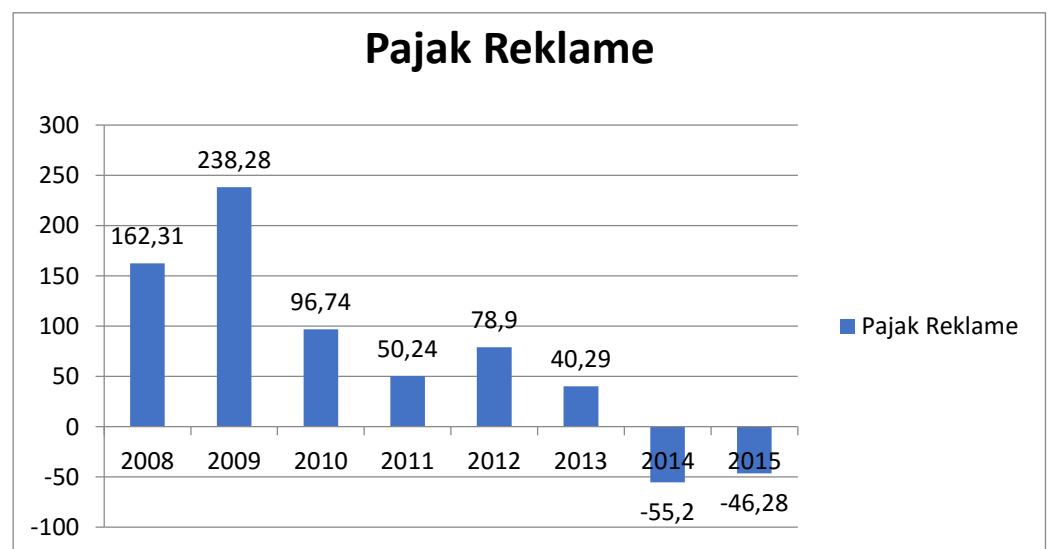
Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.16
Laporan Realisasi Pertumbuhan Pajak Hiburan
D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2015

Berdasarkan gambar 4.16 selama periode penelitian menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan pajak hiburan di D.I. Yogyakarta tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2008 pajak hiburan memiliki nilai presentase sebesar 112,87% sedangkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 135,79%, namun pada tahun 2010 justru mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 70,21%. Tidak hanya itu, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 pajak hiburan kembali mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar -46,56%. Pada tahun 2012 pajak hiburan mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 176,18%, dan pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 193,46%. Namun, pada tahun 2014 justru mengalami penurunan kembali dengan nilai presentase sebesar 68,78%. Adapun pada tahun 2015 pajak hiburan mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai presentase sebesar 649,27%. Sehingga dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD yang terbesar dari pajak hiburan yaitu terjadi pada tahun 2015 dengan nilai presentase sebesar 649,27%.

4) Pajak Reklame

Hasil laporan realisasi pertumbuhan pajak reklame dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

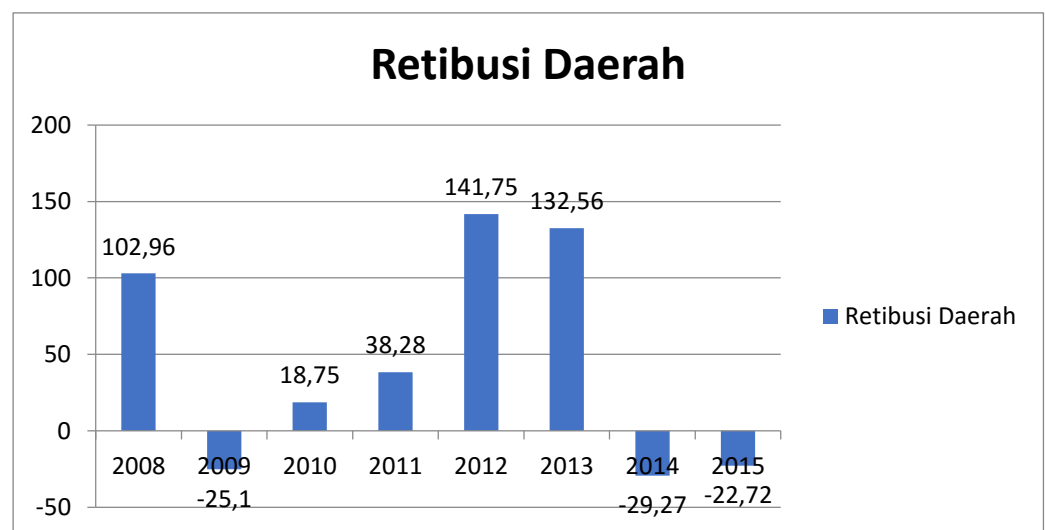
Gambar 4.17
Laporan Realisasi Pertumbuhan Pajak Reklame
D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2015

Berdasarkan gambar 17 selama periode penelitian menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan pajak reklame di D.I. Yogyakarta tidaklah konsisten. Hal ini ditandai bahwa pada tahun 2008 pajak reklame memiliki nilai presentase sebesar 162,31%, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar

238,28%, sementara itu pada tahun 2010 pajak reklame mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 96,74%. Kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali dengan nilai presentase sebesar 50,24%, namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 78,9%. Pada tahun 2013 pajak reklame kembali mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 40,29%, disusul pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan nilai presentase sebesar -55,2%, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai presentase sebesar -46,28%. Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD dari pajak reklame terbesar terdapat pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 238,28%.

5) Retribusi Daerah

Hasil laporan realisasi pertumbuhan retribusi daerah dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut :



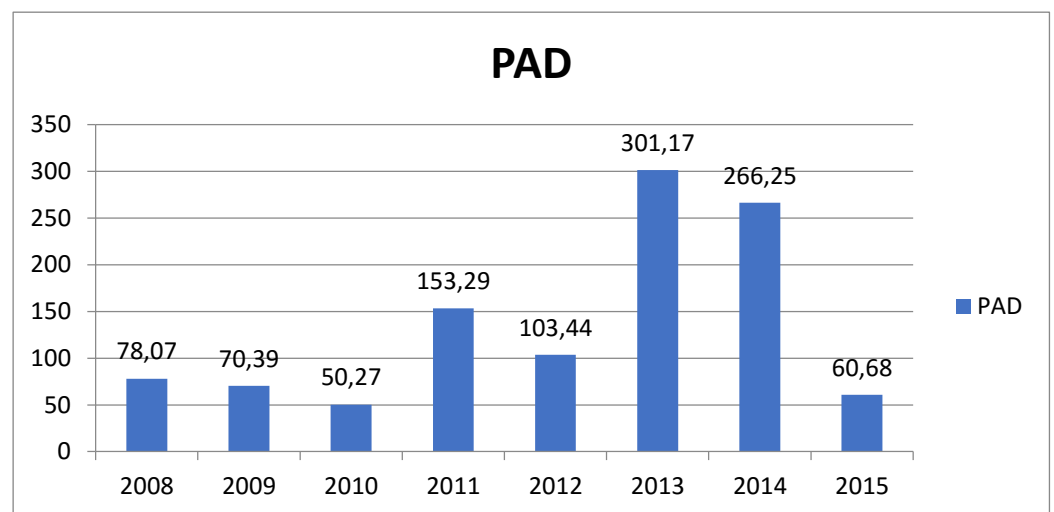
Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.18
Laporan Realisasi Pertumbuhan Retribusi Daerah
D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2015

Berdasarkan gambar 4.18 selama periode penelitian menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan retribusi daerah di D.I. Yogyakarta tidaklah stabil dan konsisten. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2008 retribusi daerah memiliki nilai presentase sebesar 102,96% namun pada tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dengan nilai presentase sebesar -25,1% kemudian tahun 2010 mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 18,75%. Pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan dengan nilai presentase sebesar 38,28%, selanjutnya disusul tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan nilai presentase sebesar 141,75%, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 132,56%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan nilai presentase sebesar -29,27%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai presentase sebesar -22,72%. Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi daerah terbesar diperoleh pada tahun 2012 dengan nilai presentase sebesar 141,75%.

6) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil laporan realisasi pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut :



Sumber : DPPKAD D.I. Yogyakarta

Gambar 4.19
Laporan Realisasi Pertumbuhan PAD D.I. Yogyakarta
Tahun 2008-2015

Berdasarkan gambar 4.19 selama periode penelitian menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di D.I. Yogyakarta tidaklah stabil. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 pendapatan asli daerah memiliki presentase sebesar 78,07%, kemudian menurun pada tahun 2009 dengan nilai presentase sebesar 70,39, dan menurun kembali pada tahun 2010 dengan nilai presentase sebesar 50,27%. Sementara itu pada tahun 2011 mengalami

kenaikan dengan nilai presentase sebesar 153,29%, akan tetapi tahun 2012 mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 103,44%. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan nilai presentase sebesar 301,17%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 266,25%. Kemudian puncaknya pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan nilai presentase sebesar 60,68%. Sehingga dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD terbesar terdapat pada tahun 2013 dengan nilai presentase sebesar 301,17%.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi daerah dan PAD yang disajikan pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	40	-69.00	527.41	52.3983	105.16110
Pajak Restoran	40	-47.15	857.55	61.5540	141.89676
Pajak Hiburan	40	-79.14	518.42	32.9900	86.00459
Pajak Reklame	40	-25.61	199.44	14.0820	36.27415
Retribusi Daerah	40	-77.84	72.81	8.9303	32.08965
Pendapatan Asli Daerah	40	-44.12	174.47	27.0890	32.73688
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sampel (N) berjumlah 40. Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar -44,12%, nilai maximum sebesar 174,47%, nilai rata-rata sebesar 27,0890% dan nilai standar deviasi sebesar 32,73688%. Presentase pertumbuhan pajak hotel selama periode penelitian memiliki nilai minimum sebesar -69,00% yang terjadi pada

Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2008 hal ini menandakan bahwa kemampuan minimum Kabupaten/Kota dalam memperoleh pajak hotel sebesar 69,00%. Sementara nilai maximum presentase pajak hotel selama periode penelitian yaitu sebesar 527,41% yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 hal ini menandakan bahwa kemampuan maksimum Kabupaten/Kota dalam mendapatkan penerimaan pajak hotel sebesar 527,41%. Sedangkan nilai rata-rata pajak hotel yang diperoleh selama periode penelitian yaitu sebesar 52,3983% artinya rata-rata Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak hotel sebesar 52,3983% . Adapun standar deviasi pajak hotel selama periode penelitian yaitu sebesar 105,16110% artinya penyebaran pertumbuhan pajak hotel pada Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta sebesar 105,16110%.

Hasil deskriptif variabel pajak restoran selama periode penelitian memiliki presentase nilai minimum sebesar -47,15% terjadi pada Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2009 hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak restoran sebesar -47,15%. Sementara nilai maksimum pajak restoran diperoleh sebesar 857,55% terjadi di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2012 hal ini menandakan bahwa nilai maksimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak restoran sebesar 857,55%. Sedangkan nilai rata-rata pajak restoran selama periode penelitian diperoleh presentase sebesar 61,5540% artinya rata-rata Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta memperoleh pendapatan pajak restoran sebesar

61,5540%. Adapun untuk nilai standar deviasi diperoleh presentase sebesar 141,89676% artinya penyebaran pajak restoran di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta sebesar 141,89676%.

Hasil deskriptif pajak hiburan selama periode penelitian memiliki presentase nilai minimum sebesar -79,14% terjadi pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak hiburan sebesar -79,14%. Sedangkan nilai maksimum pajak hiburan diperoleh presentase sebesar 518,42% terjadi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 hal ini menunjukkan bahwa nilai maksimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak hiburan diperoleh presentase sebesar 518,72%. Sementara nilai rata-rata selama periode penelitian diperoleh presentase sebesar 32,9900% artinya rata-rata Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pendapatan pajak hiburan sebesar 32,9900%. Adapun nilai standar deviasi selama periode penelitian diperoleh presentase sebesar 86,00459% artinya penyebaran pajak hiburan pada Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta sebesar 86,00459%.

Hasil deskriptif pajak reklame selama periode penelitian memiliki nilai minimum sebesar -25,61% terjadi pada Kota Yogyakarta tahun 2014 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan minimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak reklame sebesar -25,61%. Sedangkan nilai maksimum pajak reklame diperoleh presentase sebesar 199,44% terjadi pada Kabupaten Bantul tahun 2009, hal ini menandakan

bahwa kemampuan maksimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pajak reklame yaitu sebesar 199,44%. Sementara itu, nilai rata-rata pajak reklame diperoleh presentase sebesar 14,0820% artinya rata-rata Kabupaten/Kota dalam memperoleh pendapatan pajak reklame sebesar 14,0820%. Adapun nilai standar deviasi pajak reklame diperoleh presentase sebesar 36,27415% artinya penyebaran pajak reklame di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta sebesar 36,27415%.

Hasil deskriptif retribusi daerah selama periode penelitian memiliki presentase nilai minimum sebesar -77,84% terjadi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 hal ini menandakan bahwa kemampuan minimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pendapatan retribusi daerah sebesar -77,84%. Sementara nilai maksimum retribusi daerah diperoleh presentase sebesar 72,81% terjadi di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan maksimum Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh retribusi daerah sebesar 72,81%. Sementara nilai rata-rata retribusi daerah diperoleh presentase sebesar 8,9309% artinya rata-rata Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dalam memperoleh pendapatan retribusi daerah sebesar 8,9309%. Adapun nilai standar deviasi retribusi daerah diperoleh presentase sebesar 32,08965% artinya penyebaran retribusi daerah di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta sebesar 32,08965%.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos uji asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus berdistribusi normal, tidak mengandung multikolinrearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian regresi berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang telah diperoleh memiliki distribusi normal atau dapat dikatakan diperoleh dari populasi normal (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.38120964
	Absolute	.214
Most Extreme Differences	Positive	.173
	Negative	-.214
Kolmogorov-Smirnov Z		1.350
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar $0,052 > sig (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa residual data dari penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari multikolinearitas. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.122	.132		-.923	.363		
Pajak Hotel	.269	.096	.250	2.806	.008	.551	1.814
Pajak Restoran	.505	.111	.409	4.555	.000	.542	1.844
Pajak Hiburan	.232	.099	.256	2.347	.025	.366	2.733
Pajak Reklame	-.088	.056	-.110	-1.557	.129	.878	1.139

Retribusi	.179	.083	.220	2.156	.038	.420	2.380
Daerah							

Hasil analisis :

1. Nilai VIF pada variabel pajak hotel adalah $1,814 < 10$ dengan nilai tolerance $0,551 > 0,1$. Artinya asumsi pada variabel pajak hotel tidak mengandung multikolinearitas.
2. Nilai VIF pada variabel pajak restoran adalah $1,844 < 10$ dengan nilai tolerance $0,542 > 0,1$. Artinya asumsi pada variabel pajak restoran tidak mengandung multikolinearitas.
3. Nilai VIF pada variabel pajak hiburan adalah $2,733 < 10$ dengan nilai tolerance $0,366 > 0,1$. Artinya asumsi pada variabel pajak hiburan tidak mengandung multikolinearitas.
4. Nilai VIF pada variabel pajak reklame adalah $1,139 < 10$ dengan nilai tolerance $0,878 > 0,1$. Artinya asumsi pada variabel pajak reklame tidak mengandung multikolinearitas.
5. Nilai VIF pada variabel retribusi daerah adalah $2,380 < 10$ dengan nilai tolerance $0,420 > 0,1$. Artinya asumsi pada variabel retribusi daerah tidak mengandung multikolinearitas.

Kesimpulan :

Nilai VIF untuk semua variabel pada Tabel 4.9 menunjukkan angka < 10 dan nilai tolerance semua variabel pada Tabel tersebut $> 0,1$.

Sehingga regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan dengan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.415	.109		3.801	.001
1 Pajak Hotel	-.117	.079	-.280	-1.485	.147
Pajak Restoran	.184	.092	.381	2.009	.053
Pajak Hiburan	-.066	.082	-.187	-.808	.425
Pajak Reklame	-.049	.047	-.156	-1.045	.303
Retribusi Daerah	-.103	.069	-.323	-1.496	.144

a. Dependent Variable: ABS_RES

Syarat-syarat regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas adalah :

- 1) Jika nilai sig > 0,05 maka non heteroskedastisitas.

2) Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.

Hasil analisis :

- 1) Nilai sig pada variabel pajak hotel adalah $0,147 > 0,05$ sehingga non heteroskedastisitas.
- 2) Nilai sig pada variabel pajak restoran adalah $0,053 > 0,05$ sehingga non heteroskedastisitas.
- 3) Nilai sig pada variabel pajak hiburan adalah $0,425 > 0,05$ sehingga non heteroskedastisitas.
- 4) Nilai sig pada variabel pajak reklame adalah $0,303 > 0,05$ sehingga non heteroskedastisitas.
- 5) Nilai sig pada variabel retribusi daerah adalah $0,144 > 0,05$ sehingga non

Kesimpulan :

Berdasarkan pada Tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model regresi memiliki nilai sig > 0,05. Maka, model regresi pada penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada regresi. Uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.923 ^a	.852	.830	.40828	1.793

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah 1,793. Sedangkan nilai dU dalam Tabel *Durbin-Watson* sebesar 1,7859 dan hasil 4-du sebesar 2,2141. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari DW berada diantara $dU < dw < 4-dU$ ($1,7859 < 1,793 < 4-1,7859 = 1,7859 < 1,793 < 2.274$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya presentase semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923 ^a	.852	.830	.40828

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,830. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebesar 83,0% oleh variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah sedangkan sisanya sebesar 17,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terhadap variabel dependen. Pengujian simultan ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Uji F dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.530	5	6.506	39.031	.000 ^b
	Residual	5.668	34	.167		
	Total	38.198	39			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Tabel 4.13 menunjukkan nilai F sebesar 39,031 dan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah.

3. Uji Parsial (Uji statistik t)

Uji Statistik t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011).

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.122	.132		-.923	.363
1 Pajak Hotel	.269	.096	.250	2.806	.008
Pajak Restoran	.505	.111	.409	4.555	.000
Pajak Hiburan	.232	.099	.256	2.347	.025
Pajak Reklame	-.088	.056	-.110	-1.557	.129
Retribusi Daerah	.179	.083	.220	2.156	.038

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.14, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel pajak hotel yang memiliki nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.
2. Variabel pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel pajak restoran

yang memiliki nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

3. Variabel pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel pajak hiburan yang memiliki nilai signifikansi $0,025 < 0,05$. Maka hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.
4. Variabel pajak reklame berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel pajak reklame yang memiliki nilai signifikansi $0,129 > 0,05$. Maka hipotesis 4 yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak.
5. Variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel retribusi daerah yang memiliki nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Maka hipotesis 5 yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.122	.132		-.923	.363
1 Pajak Hotel	.269	.096	.250	2.806	.008
Pajak Restoran	.505	.111	.409	4.555	.000
Pajak Hiburan	.232	.099	.256	2.347	.025
Pajak Reklame	-.088	.056	-.110	-1.557	.129
Retribusi Daerah	.179	.083	.220	2.156	.038

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dirumuskan bahwa persamaan regresi yaitu :

$$Y = -0,122 + 0,269X_1 + 0,505X_2 + 0,232X_3 - 0,088X_4 + 0,179X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan pajak hotel (X1) akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,269. Setiap kenaikan pajak restoran (X2) akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,505. Setiap kenaikan pajak hiburan (X3) akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y)

sebesar 0,232. Setiap penurunan pajak reklame (X4) akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -0,088. Setiap kenaikan retribusi daerah (X5) akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,179.

D. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama pada penelitian ini menduga bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terdukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi t yang dihasilkan sebesar $0,008 < \alpha (0,05)$. Pengujian tersebut mengindikasikan bahwa berkembangnya industri perhotelan di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta mampu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan wisatawan yang berkunjung baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Hotel seperti menginap atau beristirahat di hotel. Selain itu, pertumbuhan pajak hotel selama periode penelitian mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mampu melebihi target yang telah ditetapkan dari setiap Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Semakin banyak hotel yang didirikan, maka akan semakin besar

penerimaan pajak hotel yang dihasilkan, hal ini nantinya mampu berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walakandou (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Temaja dan Suputra (2014) yang menyatakan bahwa pajak hotel juga berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis kedua pada penelitian ini menduga bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t yang dihasilkan sebesar $0,00 < \alpha (0,05)$. Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa berkembangnya industri restoran di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berkembangnya bisnis kuliner di D.I. Yogyakarta mampu menarik para pelaku usaha untuk mendirikan restoran, dengan semakin bertambahnya restoran yang didirikan maka dapat menambah penerimaan pajak restoran yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Temaja dan Suputra (2014) yang menemukan bahwa

pajak restoran juga berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menduga bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terdukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi t yang dihasilkan sebesar $0,025 < \alpha (0,05)$. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa berkembangnya industri hiburan pada Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta mampu meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan yang kemudian dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata, D.I. Yogyakarta mampu menarik para pelaku industri hiburan untuk mendirikan tempat-tempat hiburan maupun pertunjukkan di wilayah ini. Tidak heran jika di D.I. Yogyakarta terdapat berbagai macam hiburan yang disuguhkan. Semakin banyak hiburan yang tersedia, maka akan semakin besar penerimaan Pajak Hiburan yang diterima. Besarnya Pajak Hiburan yang diterima ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rame dan Wirawan (2013) yang menyatakan bahwa

Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis keempat pada penelitian ini menduga bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terdukung atau ditolak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi t yang dihasilkan sebesar $0,129 > \alpha (0,05)$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan Pajak Reklame di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemasangan reklame di D.I. Yogyakarta pada dasarnya tergolong banyak, namun tidak semua pajak reklame dibayarkan dengan benar. Hal ini terbukti dari rendahnya penerimaan Pajak Reklame yang diterima. Hanya pada tahun-tahun tertentu saja Pajak Reklame mampu meningkat seperti pada tahun politik. Namun, untuk tahun-tahun biasa penerimaan Pajak Reklame di D.I. Yogyakarta dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini dikarenakan para pelaku yang menggunakan jasa pemasangan reklame tidak menjalankan kewajiban untuk membayar pajak reklame dengan baik. Sehingga banyak pajak reklame yang tidak dapat dipungut sesuai dengan waktu jatuh tempo. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab para pelaku bisnis maupun industri yang menggunakan reklame sebagai media untuk melakukan promosi menyebabkan

ketidakstabilan dan justru mengalami penurunan penerimaan Pajak Reklame. Selain itu, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak juga salah satu faktor yang penting. Oleh karena itu, semakin banyak oknum yang tidak mampu membayar pajak reklame dengan baik maka akan semakin banyak pajak reklame yang tidak dapat dipungut. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tilaar (2013) yang menyatakan bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranty (2008) yang menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yan (2012) yang menyatakan bahwa Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Diduga meskipun pemasangan reklame di D.I. Yogyakarta terbilang cukup banyak namun hal itu tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan para pelaku yang menggunakan jasa pemasangan reklame tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, kurangnya pengawasan pemerintah dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak reklame. Semakin banyak Pajak Reklame yang tidak dapat dipungut maka akan

semakin rendah penerimaan Pajak Reklame, dan nantinya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

5. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis kelima pada penelitian ini menduga bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terdukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar $0,38 < \alpha (0,05)$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemungutan retribusi daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar Retribusi Daerah yang dihasilkan, maka besar Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang positif, khususnya di D.I. Yogyakarta karena baik di Kabupaten/Kota pemungutan Retribusi Daerah berjalan dengan baik. Pertumbuhan Retribusi Daerah memang tidak stabil, namun ketika mengalami kenaikan, kenaikan yang dihasilkan sangatlah signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayanti *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochimah *et al.* (2012) ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

